



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Manado Post (Hal. 1)

Rabu, 8 April 2020

## Siap Geser Rp575 Miliar Anggaran Pilkada



**ANGGARAN** Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mencapai Rp575 miliar (lihat grafis). Dana tersebut diminta digunakan untuk penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) mengingat Pilkada 2020 telah tunda 2021.

➤ Baca **SIAP...** Hal.7

<b>DANA PILKADA DI SULUT:</b>	• Provinsi	Rp350 miliar
	• Manado	Rp54 miliar
	• Minut	Rp55 miliar
	• Bitung	Rp44 miliar
	• Tomohon	Rp25 miliar
	• Bolsel	Rp22,4 miliar
• Boltim	Rp24,6 miliar	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp575 miliar</b>	

### SIAP...

Sambungan Dari Hal: 1

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi KPU RI terkait pengembalian anggaran. "Belum ada Juknis jadi belum bisa bicara lebih jauh. KPU pusat juga masih menunggu Perppu sebagai landasan hukum kalau memang anggaran akan dikembalikan," tuturnya. Lanjut dia, pada prinsipnya KPU Sulut siap mengembalikan anggaran sisa lengkap dengan pertanggungjawaban penggunaan dana selama tahapan berlangsung. "Sisa anggaran akan kita kembalikan ke Pemda kalau sudah ada instruksi. Sampai saat ini masih belum," ujarnya.

Senada, Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan pihaknya siap mengembalikan sisa anggaran ke kas daerah. "Kalau dibatalkan Pilkada, anggaran

dikembalikan bersama pertanggungjawaban yang sudah terpakai," ungkapnya. Diketahui, Pemprov Sulut mengibahkan Rp 360 miliar dari APBD untuk membiayai Pemilihan Gubernur. Masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp220 miliar, Badan Pengawas Pemilu Rp110 miliar dan untuk pengamanan kepada TNI/Polri sebesar Rp30 miliar.

Terpisah, Komisioner KPU Bolmong Selatan (Bolsel) Fijay Bumolo mengatakan, pihaknya siap mengembalikan dana hibah tersebut kepada Pemerintah Bolsel. "Kami telah mendapatkan dana 6,1 miliar pada APBD perubahan tahun 2019 dan APBD tahun 2020," katanya. Lanjutnya, untuk pengembalian masih sementara menghitung, sebab anggarannya telah dipakai pada proses tahapan Pilkada baru-baru ini. "Sesuai dengan edaran itu, cut off atau penutupan transaksi penggunaan dana hibah yaitu tanggal 31 Maret 2020. Sedangkan

cut off atau penutupan transaksi penggunaan dana pertanggungjawaban keuangan hibah tanggal 30 April 2020," ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Bawaslu Bolsel Arthur Waroka menuturkan, merebahnya pandemi penyebaran Covid-19, maka semua penggunaan hibah Bawaslu dan KPU dihentikan sementara. Sambil menunggu petunjuk selanjutnya. "Intinya Bawaslu siap mengembalikan dana hibah tersebut, demi menyelesaikan persoalan bangsa ini. Karena pandemi Covid-19 ini harus dilawan bersama-sama," tegas mantan pengurus Ansor Bolsel ini. Dia menambahkan, anggaran yang telah dicairkan pada tahap I ini, baru Rp 2,7 miliar dari Rp 6,9 miliar dana hibah yang telah disiapkan. "Dana yang terpakai ini sekitar dua miliaran, paling banyak terpakai pada kegiatan pengawasan," sebutnya.

Sebelumnya, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru meminta arahan dari Gubernur Sulut terkait

anggaran Pilkada sebesar Rp 16,7 miliar yang belum disalurkan, baik KPU, Bawaslu, dan pengamanan. "Kalaupun anggaran ini digeser untuk penanganan virus ini, maka kami siap," katanya. Sama hal dengan Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut. Dia juga meminta anggaran Pilkada dapat digeser untuk penanganan Covid-19 di Kota Manado. "Kami sementara konsultasikan ke Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulut dan Kejaksaan terkait penggunaan anggaran Pilkada supaya tidak masalah hukum dikemudian hari," ungkapnya.

Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief SH MH mengatakan, hal ini perlu lagi dikaji karena pergeseran anggaran haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan Hukum. "Untuk pergeseran anggaran Pilkada harus ada aturannya. Atau Perppu. Bila belum ada, maka belum bisa digeser," pungkasnya. (jen/gur)